



Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah pada SDN Unggulan 10 Pulau Morotai

Fahmi Jaguna¹

¹Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Pasifik Morotai

Email : ffahmidjaguna@gmail.com

Article Info

Article history:

Received June 09, 2025

Revised June 18, 2025

Accepted June 26, 2025

Keywords:

Implementation, School Based Management

ABSTRACT

The implementation of School-Based Management (SBM) is a crucial strategy in fostering autonomy and improving the quality of education in primary education institutions. This study aims to provide an in-depth description of the planning, implementation, community participation, as well as the supporting and inhibiting factors of SBM at SDN Unggulan 10 Pulau Morotai. Using a descriptive qualitative approach, data were collected through observation, interviews, and documentation involving the school principal and teachers. The findings reveal that the planning process is grounded in the school's vision, mission, and contextual analysis. The implementation of SBM includes the development of the School Budget and Activity Plan (RAPBS), the integration of the Merdeka Curriculum, and the active involvement of the school committee. Community participation emerges as a strategic element in supporting school programs. Support from school stakeholders, the school committee, and external collaborations serve as key enablers, while limitations in resources present ongoing challenges. These findings affirm that SBM at SDN Unggulan 10 Morotai has been implemented with strong commitment and a spirit of collaboration.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received June 09, 2025

Revised June 18, 2025

Accepted June 26, 2025

Keywords:

Implementasi, Manajemen Berbasis Sekolah

ABSTRAK

Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan strategi penting dalam mewujudkan kemandirian dan peningkatan mutu pendidikan di satuan pendidikan dasar. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara mendalam proses perencanaan, pelaksanaan, partisipasi masyarakat, serta faktor pendukung dan penghambat MBS di SDN Unggulan 10 Pulau Morotai. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap kepala sekolah dan guru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusunan perencanaan didasarkan pada visi, misi, dan analisis kondisi sekolah. Pelaksanaan MBS mencakup penyusunan RAPBS, pengembangan Kurikulum Merdeka Belajar, serta pelibatan aktif komite sekolah. Partisipasi masyarakat menjadi elemen strategis dalam mendukung program-program sekolah. Dukungan warga sekolah, komite, dan kerja sama eksternal menjadi faktor penguat, sementara keterbatasan sumber daya menjadi tantangan tersendiri. Temuan ini menegaskan bahwa MBS di SDN Unggulan 10 Morotai telah berjalan dengan komitmen kuat dan semangat kolaboratif.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Fahmi Jaguna



PENDAHULUAN

Dalam dinamika pembangunan pendidikan yang terus berkembang, peningkatan mutu pendidikan tidak lagi semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, melainkan telah menjadi bagian dari tanggung jawab bersama yang mencakup seluruh satuan pendidikan, masyarakat, dan pemerintah daerah. Salah satu pendekatan yang digagas untuk mewujudkan mutu pendidikan yang lebih partisipatif, efektif, dan kontekstual adalah melalui Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), atau yang secara internasional dikenal sebagai *School Based Management*.

Manajemen Berbasis Sekolah merupakan paradigma baru dalam pengelolaan pendidikan yang menggeser sistem sentralistik menuju desentralisasi. Abu dan Duhou (2022:16) menyatakan bahwa MBS adalah salah satu alternatif dalam mengelola penyelenggaraan pendidikan secara desentralisasi dengan menjadikan sekolah sebagai unit utama peningkatan kualitas. Pendekatan ini menempatkan sekolah sebagai pusat pengambilan keputusan, memberi ruang bagi partisipasi aktif warga sekolah, termasuk kepala sekolah, guru, peserta didik, serta masyarakat sekitar. Harapannya, MBS dapat melahirkan iklim belajar yang lebih adaptif terhadap kebutuhan lokal, responsif terhadap perubahan, serta efisien dalam pengelolaan sumber daya.

Konsep MBS mengedepankan otonomi, partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan fleksibilitas. Dengan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada sekolah dalam merencanakan, mengelola, dan mengevaluasi program pendidikan, diharapkan keputusan-keputusan yang diambil akan lebih relevan dengan kebutuhan peserta didik dan konteks lingkungan sosial sekolah. Dalam konteks ini, kepala sekolah memegang peranan sentral sebagai pemimpin pembelajaran dan manajer perubahan yang harus mampu menginisiasi perencanaan strategis, memimpin pelaksanaan program, serta membangun sinergi dengan masyarakat.

Mukhtar (2016:32) menekankan bahwa sekolah yang menerapkan MBS harus memahami kekuatan dan kelemahannya sendiri, serta mampu membaca potensi dan tantangan yang ada. Dengan kesadaran ini, sekolah dapat merumuskan visi, misi, tujuan, dan strategi yang tepat guna mencapai kualitas pendidikan yang diinginkan. Selain itu, Hadiyanto (2018:72) menambahkan bahwa budaya mutu harus menjadi landasan nilai yang tertanam dalam setiap individu di lingkungan sekolah. Profesionalisme menjadi kata kunci dalam setiap tindakan, baik dalam pengelolaan pembelajaran maupun dalam layanan administratif.

SD Negeri Unggulan 10 Pulau Morotai sebagai salah satu lembaga pendidikan dasar yang berada di wilayah kepulauan, menjadi representasi penting dalam mengkaji implementasi MBS di wilayah 3T (Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal). Keunggulan sekolah ini tidak hanya diukur dari prestasi akademik semata, melainkan juga dari kemampuannya mengelola sumber daya secara mandiri, membangun partisipasi masyarakat, dan menciptakan iklim belajar yang berkualitas meski di tengah keterbatasan geografis dan infrastruktur. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggali secara mendalam bagaimana proses perencanaan, pelaksanaan, keterlibatan masyarakat, serta faktor-faktor pendukung implementasi MBS di SD Negeri 10 Pulau Morotai.



Kendati pemahaman tentang MBS secara umum telah dimiliki oleh para tenaga kependidikan, termasuk guru dan kepala sekolah, namun implementasi konsep ini dalam praktik sering kali menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, minimnya pelatihan, kurangnya dukungan sarana-prasarana, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pendidikan. Maka, pertanyaan penelitian difokuskan pada beberapa aspek kunci: Bagaimana proses perencanaan program pendidikan oleh kepala sekolah? Sejauh mana pelaksanaan MBS sesuai dengan prinsip-prinsip desentralisasi dan otonomi sekolah? Seperti apa keterlibatan masyarakat dalam mendukung kebijakan dan program sekolah? Dan apa saja faktor yang mendukung keberhasilan atau menghambat penerapan MBS di sekolah ini?

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai praktik MBS pada satuan pendidikan dasar di daerah kepulauan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dan praktis, baik dalam pengembangan kebijakan pendidikan berbasis konteks lokal, maupun dalam penyusunan strategi peningkatan mutu pendidikan dasar di daerah perbatasan.

Sebagaimana ditegaskan oleh Mulyasa (2022:25), implementasi MBS memiliki tiga tujuan utama: meningkatkan efisiensi, meningkatkan mutu, dan memperluas pemerataan layanan pendidikan. Tiga tujuan ini menjadi tolok ukur penting dalam menilai keberhasilan pelaksanaan MBS di SD Negeri Unggulan 10 Pulau Morotai. Jika MBS mampu meningkatkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya, mendorong kualitas pembelajaran, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat di Pulau Morotai, maka sekolah ini dapat menjadi model inspiratif bagi satuan pendidikan lainnya, terutama di wilayah dengan karakteristik geografis serupa.

Dengan menjadikan SDN Unggulan 10 Pulau Morotai sebagai objek penelitian, studi ini tidak hanya berupaya memotret implementasi MBS secara deskriptif, tetapi juga berkeinginan untuk menyoroti nilai-nilai strategis dari otonomi sekolah, kepemimpinan kepala sekolah, serta peran aktif masyarakat dalam pembangunan pendidikan. Dalam konteks inilah, MBS bukan hanya sekadar strategi manajemen, tetapi juga wujud nyata dari semangat kolektif untuk menghadirkan pendidikan yang berkualitas, adil, dan berkelanjutan bagi seluruh anak bangsa, di mana pun mereka berada.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mengungkap secara utuh dan mendalam praktik implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di SDN Unggulan 10 Pulau Morotai. Pendekatan ini dipilih karena selaras dengan tujuan penelitian, yakni memahami dinamika manajerial di tingkat sekolah dasar dalam konteks sosial, budaya, dan geografis yang khas. Sejalan dengan pendapat Moleong (2016:43), pendekatan kualitatif bertujuan untuk menyajikan realitas dalam bentuk kata-kata dan tindakan, bukan sekadar angka, sehingga memungkinkan peneliti menangkap nuansa dan makna yang tersembunyi di balik praktik MBS.

Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara *purposive*, yakni SDN Unggulan 10 Pulau Morotai yang dinilai konsisten menerapkan prinsip-prinsip MBS. Sekolah ini diposisikan sebagai ruang belajar kontekstual di mana strategi desentralisasi pendidikan diimplementasikan melalui pemberdayaan kepala sekolah, guru, dan komite. Oleh karena itu, subjek penelitian



terdiri dari kepala sekolah selaku pemimpin manajerial, guru sebagai pelaksana kebijakan, serta komite sekolah sebagai representasi masyarakat.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung, wawancara mendalam, dokumentasi, dan studi pustaka. Peneliti hadir secara aktif di lapangan, menjalin hubungan interpersonal dengan subjek penelitian, serta melakukan pengamatan berulang guna memperoleh data yang valid dan kaya makna. Teknik triangulasi digunakan untuk menguji keabsahan data, memastikan bahwa informasi yang diperoleh memiliki kredibilitas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Seluruh data dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Nasution, 2023:42). Melalui proses ini, data yang semula terpisah dirangkai menjadi narasi utuh tentang bagaimana MBS hadir dan bergerak dalam denyut kehidupan pendidikan di Pulau Morotai. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menyajikan potret administratif, tetapi juga menangkap jiwa manajemen partisipatif yang tumbuh dari akar lokalitas sekolah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di SDN Unggulan 10 Pulau Morotai, salah satu sekolah dasar yang berada di wilayah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal) namun menunjukkan kemajuan signifikan dalam kualitas tata kelola dan layanan pendidikan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan MBS di sekolah tersebut tidak hanya dilaksanakan secara efektif dan terstruktur, melainkan juga partisipatif dan kontekstual, selaras dengan karakteristik lokal Pulau Morotai. Berikut ini merupakan hasil dan pembahasan dari implementasi MBS di SDN Unggulan 10 Pulau Morotai yang dianalisis melalui enam aspek utama:

1. Kepemimpinan Demokratis dan Visioner Kepala Sekolah

Kepala sekolah memainkan peran sentral dalam mewujudkan semangat dan praktik MBS. Di SDN Unggulan 10 Pulau Morotai, kepemimpinan kepala sekolah mencerminkan gaya manajerial yang demokratis, visioner, dan transformatif. Kepala sekolah tidak mendominasi pengambilan keputusan secara sepihak, melainkan menciptakan ruang musyawarah yang terbuka dan inklusif. Setiap penyusunan program kerja sekolah, seperti Rencana Kerja Sekolah (RKS), dilakukan melalui rapat pleno yang melibatkan guru, staf tata usaha, komite sekolah, bahkan perwakilan orang tua siswa. Pendekatan ini memperlihatkan penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi yang merupakan pilar utama dari MBS.

Selain aspek partisipatif, kepala sekolah juga menunjukkan sikap tegas dalam hal pengawasan mutu pengajaran. Terdapat kebijakan disiplin yang terukur bagi guru yang tidak menyusun perangkat ajar seperti RPP dan jurnal harian. Bahkan, sanksi berupa pembebasan tugas mengajar sementara diberlakukan bagi guru yang lalai. Kebijakan ini menunjukkan bahwa kepala sekolah tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi pemimpin instruksional yang menjunjung tinggi integritas profesional pendidik.

Gaya kepemimpinan semacam ini menciptakan keseimbangan antara otoritas dan kolaborasi, antara struktur dan fleksibilitas, yang akhirnya membentuk iklim sekolah yang sehat



dan produktif. Di tengah keterbatasan geografis Morotai, kepemimpinan ini menjadi kunci bagi adaptasi lokal terhadap model MBS.

2. Kedisiplinan Guru dan Siswa sebagai Pilar Tata Kelola Sekolah

Disiplin menjadi pondasi penting dalam sistem manajemen di SDN Unggulan 10 Pulau Morotai. Salah satu hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 16 indikator kedisiplinan yang secara eksplisit harus dipenuhi oleh guru. Indikator tersebut meliputi kedatangan tepat waktu, kehadiran dalam apel pagi, keaktifan dalam rapat dinas, pemenuhan administrasi pembelajaran, pelaksanaan evaluasi, serta penyampaian laporan kinerja secara rutin. Pengawasan terhadap indikator ini dilakukan tidak hanya oleh kepala sekolah, tetapi juga secara horizontal oleh rekan sejawat.

Hal serupa juga diterapkan kepada siswa. Sekolah memiliki regulasi internal yang jelas mengenai jam masuk, seragam, kehadiran, keterlibatan dalam kegiatan kelas dan ekstrakurikuler, serta larangan keras terhadap narkoba. Sanksi diberikan secara bertahap namun konsisten, mulai dari teguran tertulis hingga pelaporan kepada orang tua. Kedisiplinan ini bukan hanya instrumen pengendali perilaku, tetapi juga menjadi sarana pembentukan karakter.

Efektivitas kedisiplinan tersebut menciptakan iklim belajar yang tertib, teratur, dan bebas gangguan. Siswa merasa aman dan termotivasi, guru dapat fokus menjalankan tugas, sementara kepala sekolah memiliki kejelasan dalam mekanisme kontrol mutu. Dalam konteks MBS, hal ini menunjukkan bahwa manajemen tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga menyentuh aspek-aspek moral dan etika kerja warga sekolah.

3. Inovasi Pembelajaran dan Pengembangan Profesional Guru

Salah satu dimensi penting dari MBS adalah otonomi dalam pengembangan kurikulum dan strategi pembelajaran. Di SDN Unggulan 10 Pulau Morotai, inovasi pembelajaran menjadi bagian integral dari praktik manajerial. Sekolah telah mengembangkan pendekatan *project-based learning* (PBL) yang melibatkan siswa dalam kegiatan kontekstual, seperti observasi ekosistem laut, membuat peta wilayah desa, dan studi sejarah lokal Morotai. Penerapan teknologi digital juga dilakukan secara bertahap, terutama melalui penggunaan perangkat TIK sederhana untuk presentasi siswa dan pendokumentasian kegiatan belajar.

Dari sisi pengembangan profesional, mayoritas guru telah mengikuti pelatihan MBS sejak tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten. Pelatihan tersebut menjadi dasar bagi para guru untuk memahami filosofi dan strategi implementasi MBS, termasuk dalam pengelolaan kelas, evaluasi pembelajaran, serta pembinaan karakter siswa.

Lebih lanjut, sekolah juga aktif dalam forum KKG (Kelompok Kerja Guru), baik di tingkat sekolah maupun lintas sekolah dalam satuan wilayah. Forum ini digunakan sebagai ruang refleksi dan berbagi praktik baik, termasuk untuk melakukan supervisi sejawat dan pengembangan materi ajar berbasis lokalitas. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi MBS di sekolah ini tidak bersifat formalistik, melainkan mengarah pada transformasi praktik pedagogik yang kolaboratif dan reflektif.

4. Peran Aktif Komite Sekolah dan Masyarakat

Implementasi MBS di SDN Unggulan 10 Pulau Morotai secara nyata memperlihatkan peran aktif masyarakat sebagai mitra strategis. Komite sekolah yang terdiri dari unsur tokoh masyarakat, orang tua siswa, dan perangkat desa terlibat dalam seluruh siklus manajemen



sekolah: mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, hingga pengambilan keputusan. Setiap program besar seperti pembangunan fasilitas, pengadaan sarana belajar, hingga program literasi digital dibahas secara terbuka dalam rapat komite.

Kepala sekolah juga membangun hubungan sinergis dengan orang tua siswa melalui forum pertemuan bulanan dan komunikasi digital. Dalam forum ini, sekolah tidak hanya menyampaikan laporan, tetapi juga mendengarkan aspirasi orang tua. Kepercayaan publik yang tinggi terhadap sekolah terlihat dari antusiasme masyarakat yang mendaftarkan anaknya setiap tahun, serta partisipasi orang tua dalam kegiatan sekolah seperti lomba, pameran karya siswa, dan bakti sosial.

Pola kemitraan ini mencerminkan bahwa sekolah tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari kehidupan sosial komunitas. Dalam konteks wilayah 3T, keterlibatan masyarakat menjadi sumber daya tak ternilai yang mendukung keberlanjutan pendidikan. Dengan melibatkan masyarakat, MBS di SDN Unggulan 10 telah menjelma menjadi praktik manajemen yang bermuatan sosial dan kultural.

5. Perencanaan Strategis dan Evaluasi Berkelanjutan

Implementasi MBS yang baik membutuhkan sistem perencanaan dan evaluasi yang matang. SDN Unggulan 10 Pulau Morotai memiliki dokumen perencanaan strategis yang disusun secara komprehensif setiap awal tahun ajaran, mencakup visi, misi, tujuan, serta indikator capaian kinerja. Dokumen ini tidak hanya menjadi arsip administratif, tetapi benar-benar digunakan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan dan pengalokasian sumber daya.

Evaluasi dilakukan secara berlapis dan sistematis. Guru wajib menyusun program perbaikan dan pengayaan setelah ulangan harian. Hasil evaluasi kemudian dianalisis untuk menentukan kebutuhan remedial, akselerasi, atau intervensi tambahan. Kepala sekolah melakukan supervisi langsung terhadap pelaksanaan RPP dan memastikan bahwa setiap indikator pembelajaran tercapai.

Lebih dari itu, evaluasi juga dilakukan terhadap program non-akademik seperti kegiatan ekstrakurikuler, pembinaan karakter, dan program lingkungan sekolah. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai dasar untuk melakukan revisi program, merumuskan kebijakan baru, atau memperkuat praktik-praktik yang telah efektif. Dengan demikian, evaluasi dalam MBS tidak bersifat represif, tetapi menjadi instrumen reflektif dan perbaikan berkelanjutan.

6. Tantangan dan Peluang Pengembangan Ke Depan

Meski telah menunjukkan capaian yang positif, implementasi MBS di SDN Unggulan 10 Pulau Morotai masih menghadapi beberapa tantangan. Lokasi geografis yang terpencil menyebabkan keterbatasan akses terhadap pelatihan berkelanjutan, perangkat teknologi, dan fasilitas belajar modern. Guru dan siswa juga masih mengalami keterbatasan literasi digital karena minimnya infrastruktur jaringan internet yang stabil.

Namun, potensi ke depan sangat terbuka. SDN Unggulan 10 Pulau Morotai telah memiliki fondasi manajerial yang kokoh, didukung oleh kepemimpinan yang progresif, keterlibatan masyarakat, serta budaya kerja yang kuat. Dalam jangka menengah, sekolah dapat mengembangkan program pembelajaran berbasis komunitas yang mengangkat nilai-nilai lokal Pulau Morotai, seperti budaya maritim, sejarah perjuangan, dan kearifan ekologis.

Integrasi potensi lokal ke dalam kurikulum akan menciptakan pembelajaran yang bermakna dan relevan. Sekolah juga dapat bermitra dengan lembaga pendidikan tinggi atau



LSM untuk memperkuat kapasitas guru dan memperluas jaringan kerja sama. Dengan demikian, tantangan yang ada bukan menjadi penghambat, tetapi peluang untuk menciptakan inovasi baru dalam kerangka MBS yang adaptif terhadap konteks wilayah kepulauan.

Oleh karena itu, secara keseluruhan, hasil dan pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa SDN Unggulan 10 Pulau Morotai telah berhasil mengimplementasikan Manajemen Berbasis Sekolah secara efektif, adaptif, dan inspiratif. Kepemimpinan kepala sekolah yang demokratis, kedisiplinan tinggi warga sekolah, inovasi pembelajaran yang bermakna, serta kemitraan aktif dengan masyarakat menjadi pilar keberhasilan penerapan MBS. Evaluasi yang sistematis dan perencanaan strategis menambah daya dukung terhadap keberlanjutan mutu pendidikan.

Sekolah ini memberi teladan bahwa meski berada di wilayah 3T, pendidikan bermutu dapat terwujud melalui manajemen partisipatif yang berakar pada nilai-nilai lokal dan komitmen kolektif. SDN Unggulan 10 bukan sekadar lembaga pendidikan, melainkan ruang sosial tempat tumbuhnya harapan, solidaritas, dan peradaban baru bagi generasi Morotai.

KESIMPULAN

Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di SDN Unggulan 10 Pulau Morotai menunjukkan sebuah komitmen kuat untuk menghadirkan tata kelola pendidikan yang partisipatif, mandiri, dan bertumpu pada potensi sekolah itu sendiri. Perencanaan yang dilakukan secara sistematis dimulai dengan penetapan visi, misi, tujuan, serta pemetaan kekuatan, peluang, hambatan, dan tantangan yang dihadapi. Langkah ini menjadi pondasi dalam menyusun strategi pengembangan sekolah secara berkelanjutan dan kontekstual.

Pelaksanaan MBS di sekolah ini terlihat melalui penyusunan RAPBS, pengembangan kurikulum satuan pendidikan, serta pelibatan komite sekolah dalam pengambilan keputusan penting. Meskipun proses rekrutmen tenaga pendidik masih terpusat pada dinas pendidikan, kepala sekolah telah berupaya optimal dalam membagi tugas guru secara adil dan memberikan pembinaan berkelanjutan dalam pengembangan perangkat pembelajaran. Aktivasi guru dalam KKG menjadi salah satu strategi penting untuk meningkatkan kompetensi profesional dan kualitas pembelajaran.

Komite sekolah memainkan peran vital sebagai mitra strategis dalam peningkatan mutu pendidikan, mulai dari memberikan masukan, pengawasan, hingga kolaborasi eksternal dalam pengembangan ekstrakurikuler. Dukungan penuh dari warga sekolah, wali siswa, dan masyarakat menjadi kekuatan utama dalam menghidupkan semangat kebersamaan dan gotong royong.

Namun demikian, pelaksanaan MBS belum sepenuhnya bebas dari tantangan. Keterbatasan dana dan belum terpenuhinya SDM berstatus PNS menjadi hambatan signifikan yang harus segera diatasi. Meski begitu, semangat kolektif yang tumbuh di lingkungan sekolah menjadi harapan dan modal utama dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing di Pulau Morotai. MBS di SDN Unggulan 10 Pulau Morotai adalah cermin dari tekad kuat bahwa perubahan dapat dimulai dari sekolah, oleh sekolah, dan untuk sekolah.

DAFTAR RUJUKAN

Abu, Ibtisan & Duhou. (2022). *School Based Management*. Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.



- Fattah, N. (2024). Konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan Dewan Sekolah. Bandung: Pustaka Bani Quraisy.
- Mulyasa, E. (2023). Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi, Dan Implementasi. Bandung. Remaja Rosdakarta.
- Nurkolis. (2023). Manajemen Berbasis Sekolah: Teori, Model, dan Aplikasi. Jakarta: PT Grasindo.
- Amiruddin Siahaan. (2016). Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah, Ciputat: Ciputat Press Group
- Anonim. (2022). Pedoman Pengembangan Manajemen Sekolah, Jakarta: Depdiknas, Dirjen Dikdasmen
- Baedhowi. (2016). Manajemen Berbasis Sekolah Jakarta: Direktorat Jenderal PMPTK Departemen Pendidikan Nasional
- Budi Raharjo. (2024). Manajemen Berbasis Sekolah. Jakarta: PT Grasindo.